**PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS
MENGANGKUT PENUMPANG LEBIH DARI SATU ORANG DALAM
KENDARAAN RODA DUA OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA
PAYAKUMBUH**

Muhammad Hafizh¹, Mukhlis R.², Elmayanti³

**aldeovero@gmail.com, mukhlis@lecturer.unri.ac.id,
elmayanti1509@gmail.com**

ABSTRACT

In modern times, human activities are greatly helped by technology that facilitates the movement of each individual. So the existence of two-wheeled vehicles or motorbikes makes it easier for people to move from one place to another. A motorcycle is a motorized vehicle with two or three wheels, without a house, with or without side buggies. The impact of carrying more than one passenger in a two-wheeled vehicle can endanger the motorcyclist and other traffic users, it can also be detrimental to pedestrians around the traffic and this is dangerous.

This research is an empirical sociological research. This research was conducted in the legal area of Payakumbuh City. firstly, law enforcement against violations of carrying more than one passenger in a two-wheeled vehicle in Payakumbuh City is still not being realized properly, in carrying out its role to enforce the law in the community, law enforcers must also pay attention to norms. norms or rules that must be obeyed by law enforcers or maintenance.

These norms need to be obeyed, especially in carrying out the law, drafting and maintaining the law. The inhibiting factor for law enforcement to carry more than one passenger in a two-wheeled vehicle is cultural factors and factors of law enforcement officials, such as cultural factors that should ride a motorbike by carrying more than one person is not a culture in Payakumbuh City, lack of coordination between the community and law enforcement officers, the lack of human resources owned by law enforcement officers.

Keywords: law enforcement – two wheeled vehicle - Payakumbuh Police Resor

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum PK Pidana Universitas Riau

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Riau

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Dinyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum“. Indonesia juga disebut negara Demokrasi yang tercermin dalam Undang- Undang Dasar 1945 Amandemen ke empat Pasal 1 ayat(2), bahwa ”Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Konsekuensi bahwa Indonesia adalah negara hukum, kekuasaan tertinggi dalam negara adalah hukum⁴.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur nyaman dan efisien, mampu memadukan alat transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan

biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat⁵.

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di masyarakat dalam wilayah perkotaan adalah masalah tertib lalu lintas. Hal ini terbukti karena semakin maraknya pelanggaran lalu lintas yang banyak menyebabkan kemacetan dan bahkan kecelakaan lalu lintas. Maka, dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan⁶.

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan dan keamanan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini mengatur persyaratan teknis dalam berlalu lintas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Kasus kecelakaan yang terjadi karna mengangkut penumpang lebih dari satu orang di kendaraan roda dua terus memakan korban, salah satu peristiwanya adalah kasus tiga orang kakak beradik yang baru saja mengunjungi rumah nenek mereka di Situjuh, hendak pulang ke rumah orang tuanya di Kota

⁴Achmat Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya” Jurnal Yustisia, Edisi 9 Desember 2014, hlm 139

⁵Ogy Ramajuary At Harahap, “Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Peningkatan

Disiplin Berlalu Lintas Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai” JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV Nomor 1, Februari 2017, hlm 2

⁶*Ibid.*

Payakumbuh dengan berboncengan sepeda motor.

Namun sesampai di TKP, dari arah berlawanan muncul sebuah mobil L300 yang berusaha menyalib sebuah kendaraan didepannya. Tak disangka, sebuah sepeda motor yang diboncengi kakak beradik tersebut juga melaju cukup kencang dari arah yang berlawanan. Saat itu diduga sopir tidak melihat kedatangan sepeda motor milik ketiga korban, sehingga sopir hilang kendali dan terjadilah tabrakan maut tersebut. Akibatnya ketiga korban yang berboncengan sepeda motor tersebut tewas dilokasi kejadian⁷.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 106 Ayat (9) Menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang”. Dan di Pasal 292 Menyebutkan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga fakta dan kasus yang terjadi, penulis tertarik untuk meneliti penegakan hukum dan

pelanggaran lalu lintas mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua, dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS MENGANGKUT PENUMPANG LEBIH DARI SATU ORANG DALAM KENDARAAN RODA OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PAYAKUMBUH”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum pelanggaran lalu lintas mengangkut penumpang dalam kendaraan roda dua lebih dari satu orang?
2. Apa sajakah faktor yang menghambat penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dalam mengangkut penumpang lebih dari satu orang pada kendaraan roda dua?
3. Bagaimana upaya polres kota payakumbuh dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas mengangkut penumpang lebih dari satu orang pada kendaraan roda dua?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan penulis capai dalam penulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum lalu lintas mengangkut penumpang dalam kendaraan roda dua lebih dari satu orang.
- b. Untuk mengetahui faktor dan kendala yang menghambat penegakan hukum

⁷www.pasbana.com/2018/02/pamit-tiga-kakak-beradik-tewas.html diakses 22 februari 2020 pukul 13.00

pelanggaran lalu lintas dalam mengangkut penumpang lebih dari satu orang pada kendaraan roda dua.

- c. Untuk mengetahui solusi dan upaya Polres Kota Payakumbuh dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas mengangkut penumpang lebih dari satu orang pada kendaraan roda dua.

2) Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dari hasil penelitian dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam perumusan masalah serta dapat memberikan pemikiran yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam mengetahui penegakan hukum pelanggaran lalu lintas mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua oleh kepolisian resor payakumbuh.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian berguna untuk mengetahui penegakan hukum pelanggaran lalu lintas mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua oleh kepolisian resor payakumbuh.
- c. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penegakan hukum pelanggaran lalu lintas mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua oleh kepolisian resor payakumbuh.

⁸Barda Nawawi Arif, "Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan", Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007, hlm 21.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara⁸. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral⁹.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya aparat kepolisian untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas. Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa

⁹Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 7

tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan – peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara

nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁰.

2. Pelanggaran adalah perbuatan seseorang atau perkara melanggar suatu larangan atau tindakan pidana yang lebih ringan dari kejahatan¹¹.
3. Lalu lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung¹².
4. Mengangkut adalah mengangkut atau membawa dan atau memuat dan membawa sesuatu hal¹³.
5. Penumpang adalah orang yang menumpang atau orang yg naik (kereta, kapal,sepeda motor,mobil, dsb)¹⁴.
6. Kendaraan roda dua adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah¹⁵.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat¹⁶.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Dan kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, Prenada Media, Jakarta, 2018, hal.20

¹¹<https://typoonline.com/kbbi/pelanggaran>, diakses, tanggal 23 februari 2020, pukul 04.00 wib.

¹²Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹³<https://typoonline.com/kbbi/mengangkut>, diakses, tanggal 23 februari 2020, pukul 04.10 wib.

¹⁴ <https://typoonline.com/kbbi/penumpang>, diakses tanggal 17 juli 2020, pukul 09.00 wib.

¹⁵ Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014

¹⁶ Dean Prakasa Hanif, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Penyidik Dalam*

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian dilakukan di kantor Kepolisian Resor Kota Payakumbuh. Lokasi ini dipilih karena peran penting kepolisian khususnya Satlantas dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dikota Payakumbuh, Dan Lokasi berikutnya adalah jalan lintas ngalau indah Kota Payakumbuh, dimana dijalan ini penulis akan melakukan observasi tingkat pelanggaran lalu lintas mengangkut penumpang lebih dari satu orang di jam yang sama, berkisar 3-4 jam selama satu minggu, Sehingga penulis tertarik meneliti bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas mengangkut orang lebih dari satu orang pada kendaraan roda dua di Kota Payakumbuh.

3. Populasi Dan Sample

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya¹⁷. Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan

objek denganciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, denga ciri atau sifat yang sama¹⁸.

b. Sample

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Metode purpose sampling yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah popolasi yang ada, yang katagori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis¹⁹.

4. Sumber Data

Berdasarkan penelitian hukum sosiologis, maka alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah sendiri. Sumber data primer penelitian ini adalah hasil wawancara dengan

Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Ke Kejaksaan Negri Pekanbaru”, Skripsi, Program Gelar Sarjana Hukum (S1) Universitas Riau, Pekanbaru, 2019, hlm. 11

¹⁷ <https://www.asikbelajar.com/pengertian-populasi-sampel-menurut-sugiyono/> diakses, tanggal 5 Mai 2020, pukul 12.00 wib.

¹⁸ Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.118

¹⁹ Soerjono Soekanto, ”Pengantar Penelitian Hukum”, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2012,hlm. 173.

Kasatlantas Polres Kota Payakumbuh.

b. **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain. Data sekunder besumber dari penelitian kepustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, peneliti menggunakan metode dimana telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Dalam penelitian wawancara ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Payakumbuh. Untuk mendapatkan orang yang diwawancarai ini dilakukan dengan metode *purpose sampling* yaitu mereka yang pernah melakukan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas mengangkut orang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua. Wawancara.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan lewat pengamatan langsung dilapangan. Peneliti melakukan pengamatan ditempat terhadap objek penelitian untuk diamati dan didata dengan menggunakan pancaindra.

d. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kuantitatif. Analisis ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antara fenomena yang amati, dengan logika ilmiah. sedangkan metode berfikir yang digunakan penulis yaitu *deduktif*, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang

Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah Penegakan Hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang bagus dalam bersikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian hidup²⁰. Hukum berfungsi

²⁰ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 5

sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup. Dalam masyarakat manapun, penegakan hukum akan memiliki peran penting dalam upaya masyarakat untuk mengurangi kejahatan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. Pengertian Tentang Kepolisian

Jauh sebelum istilah polisi lahir sebagai organ, kata polisi telah dikenal dalam bahasa Yunani, yakni *politeia*. Kata *politeia* digunakan sebagai title buku pertama plato, yakni *Politeia* yang mengandung makna suatu negara yang ideal sekali sesuai dengan cita-citanya, suatu negara yang bebas dari pemimpin negara yang rakus dan jahat, tempat keadilan dijunjung tinggi. Kemudian dikenal sebagai bentuk negara, yaitu negara polisi (*polizeistaat*) yang artinya negara yang menyelenggarakan keamanan dan kemakmuran atau perekonomian, meskipun negara polisi ini dijalankan secara absolut.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Tentang Kota Payakumbuh

1. Sejarah Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh terutama pusat kotanya dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak keterlibatan Belanda dalam Perang

Padri, kawasan ini berkembang menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan dari hasil tanam kopi dan terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan kolonial Hindia Belanda waktu itu.

2. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kota Payakumbuh terletak di daerah dataran tinggi yang merupakan bagian dari Bukit Barisan. Berada pada hamparan kaki Gunung Sago, bentang alam kota ini memiliki ketinggian yang bervariasi. Topografi daerah kota ini terdiri dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 meter di atas permukaan laut. Wilayahnya dilalui oleh tiga sungai, yaitu Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Sinama. Suhu udaranya rata-rata berkisar antara 26 °C dengan kelembapan udara antara 45–50%.

3. Pemerintahan Kota Payakumbuh

Kota Payakumbuh sebagai pemerintah daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tanggal 19 Maret 1956, yang menetapkan kota ini sebagai kota kecil. Kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970 menetapkan kota ini menjadi daerah otonom pemerintah daerah tingkat II Kotamadya Payakumbuh. Selanjutnya wilayah administrasi pemerintahan terdiri atas 3 wilayah kecamatan dengan 73 kelurahan yang berasal dari 7 jorong yang terdapat di 7 kanagarian yang ada waktu itu, dengan pembagian kecamatan

Payakumbuh Barat dengan 31 Kelurahan, kecamatan Payakumbuh Timur dengan 14 kelurahan dan kecamatan Payakumbuh Utara dengan 28 kelurahan.

4. Wilayah Geografis

a) Letak dan Luas

Kota payakumbuh terletak 100°35" - 100°45" Bujur Timur dan 00°10" - 00°17" Lintang Selatan, dengan luas daerah 80,43 Km², Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 514 meter, sedangkan suhu rata rata 21-32°C, dan kelembapan kota payakumbuh berkisar 63%-85 %.

b) Batas

Kota Payakumbuh berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota:

1. Sebelah Utara: Dengan Kecamatan Harau dan Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Sebelah Selatan: Dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Situjuh Limo Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Sebelah Barat: Dengan Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Sebelah Timur: Dengan Kecamatan Luak dan Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota.

B. Gambaran Umum Tentang Kepolisian Kota Payakumbuh

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota payakumbuh adalah 3.480.372 KM², dan letak wilayahnya 0 22° LU – 0 23° LS 16 100° BT – 15° 100°BB, Polres Kota Payakumbuh merupakan satu-satunya Polres tipe Urban di

Polda Sumbar yang membawahi 5 Kecamatan yang ada di Kota Payakumbuh. Luas wilayah ± 80,43 Km², terdiri dari delapan nagari, 5 kecamatan, dan 76 kelurahan. Polsek Kota Payakumbuh Secara astronomis geografis berada pada 0o17`LS dan 100o35` sampai dengan 100o42` BT. Curah hujan rata-rata 2000 s/d 2500 mm/th.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Mengangkut Penumpang Lebih Dari Satu Orang Dalam Kendaraan Roda Dua Oleh Kepolisian Resor Kota Payakumbuh

Pentingnya memahami penegakan hukum yang baik, dengan hak dan kewajiban yang dimiliki agar masyarakat mengetahui bahwa tolak ukur yang diperlukan guna menilai kinerja para pejabat penegakan hukum itu ada, kemudian didayagunakan secara efektif melaksanakan kontrol sosial secara optimal, sehingga dapat diharapkan kualitas keputusan-keputusan para pejabat penegak hukum akan terjaga.

Tingginya kualitas keputusan-keputusan para pejabat penegak hukum yang tertengarai memenuhi tolak ukur *predictability*, *accountability*, *transparency*, dan *widely participated*, akan mengindikasikan tingginya kadar demokrasi didalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²¹

Aristoteles berpendapat bahwa warga negara harus memiliki Undang-Undang yang baik dan juga bahwa warga negara harus terbiasa untuk memenuhi Undang-undang tersebut.²² Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat, termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Jadi berdasarkan analisa teori terhadap penegakan hukum khususnya terhadap mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua, bahwasanya dapat disimpulkan masih lemahnya dalam memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran, para penegak hukum lebih pro aktif lagi dalam memberikan sanksi kepada pelanggar, razia dijalan-jalan, karna ketika melakukan penyebaran kuisioner bahwa rata-rata semua responden mengatakan bahwa memang masyarakat Kota Payakumbuh kebanyakan tidak memiliki tingkat kesadaran berlalu lintas yang tinggi, dan cenderung tak mau tahu, walaupun sudah diberikan sosialisasi kepada mereka, dan yang mereka anggap ini hal yang lumrah dalam berlalu

lintas, padahal kenyataannya mereka telah membahayakan keselamatan mereka sendiri.

Dari kelima faktor dalam penegakan hukum, dalam permasalahan ini seperti faktor budaya, bahwa masyarakat menganggap perbuatan mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua seperti kebiasaan bagi mereka, selanjutnya faktor aparat penegak hukum, kurangnya sanksi pidana yang diterapkan kepada para masyarakat yang nyata-nyata itu melakukan pelanggaran berlalu lintas.

Selanjutnya faktor hukum itu sendiri, yang mana undang-undang yang mengatur ini sudah menjelaskan secara khusus bahwa masyarakat dilarang membawa penumpang lebih dari satu orang didalam kendaraan roda dua. Dan faktor masyarakat, masyarakat tidak ingin tahu kenapa mengangkut penumpang lebih dari satu orang itu berbahaya bagi nyawa mereka, walaupun sudah diberikan sosialisasi taat berkendara dan berlalu lintas, Seharusnya faktor-faktor itu dapat terwujud dalam proses penegakan hukum.

Berdasarkan kesimpulan dari penjabaran diatas, jadi bahwasanya beberapa orang yang penulis wawancarai mengatakan tidak adanya koneksi yang bagus antara sosialisasi berkendara oleh aparat kepolisian untuk

²¹ Soetandyo Wingiosoebroto, "Hukum dan Moral Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Analisis Hukum*, 2002.

²² Jill Frank, "*Theoretical Inquiries in Law*", *Critical Modernities: Politics and Law*

beyond the Liberal Imagination, Thomson Reuters, *jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 7 Juli 2020.

masyarakat, masyarakat cenderung bersikap tidak tau apa apa, dan merasa tidak peduli, padahal sudah diberikan sosialisasi bahwa membawa penumpang lebih dari satu orang didalam kendaraan roda dua itu membahayakan bagi nyawa mereka, dan nyawa pengguna lain, baik itu pengendara jalan lain, ataupun pejalan kaki yang di sekitaran jalan.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Mengangkut Penumpang Lebih Dari Satu Orang Dalam Kendaraan Roda Dua Oleh Kepolisian Resor Kota Payakumbuh

Penegakan sebagai simbol dari hukum harus lebih aktif dalam mewujudkan cita-cita dari sebuah hukum. Ditengah carut marutnya bangsa ini, persoalan penegakan hukum menjadi perhatian utama yang mau tidak mau harus menjadi perbaikan.²³ Persoalan hukum terlihat dari terbang pilihnya penegakan hukum dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat banyak mengenal hukum tajam kebawah dan tumpul keatas. Sejatinya hukum diadakan untuk menghadirkan keadilan, kebaikan, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan analisa teori terhadap penegakan hukum, bahwa teori penegakan hukum mengatakan ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan

hukum, salah satunya yaitu faktor kebudayaan dan faktor aparat penegakan hukumnya, seperti faktor kebudayaan yang mana seharusnya mengendarai sepeda motor dengan membawa lebih dari satu orang seharusnya bukan menjadi budaya di Kota Payakumbuh tersebut, Seharusnya aparat penegak hukum juga menyisir jalan jalan yang berpotensi tinggi adanya pelanggaran mengangkut penumpang lebih dari satu orang, guna memberikan efek jera kepada masyarakat yang ngotot melakukan pelanggaran tersebut. Dan adanya sosialisasi atau penyuluhan yang terjadwal kepada masyarakat tentang dilarangnya masyarakat untuk membawa penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua.

C. Upaya Polres Kota Payakumbuh Dalam Mengatasi Pelanggaran Lalu Lintas Mengangkut Penumpang Lebih Dari Satu Orang Pada Kendaraan Roda Dua

Menurut teori kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai dengan teori kesadaran hukum ini yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto, yang mana itu berkaitan dengan pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum,

²³Laurensius Arliman S, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta: Deepblish, 2016, hlm.12.

kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, dan menerima hukum. untuk membuat keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul khususnya dengan kesadaran hukum masyarakat, dan tentunya kesadaran hukum masyarakat ini tentu ada upaya didalamnya.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua di Kota Payakumbuh masih belum terealisasi semestinya, dalam menjalankan perannya untuk menegakkan hukum di tengah masyarakat, para penegak hukum juga harus memperhatikan norma-norma atau kaidah yang wajib ditaati oleh para penegak atau pemeliharaan hukum.
2. Faktor penghambat penegakan hukum tak jauh dari faktor masyarakat, budaya, aparat penegak hukum serta faktor hukum itu sendiri, yang mana kebijakan hukum terhadap Undang-undang itu dianggap masih lemah, masyarakat menganggap biasa dan budaya dengan mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua tersebut,

masyarakat sudah melupakan bahwa mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua adalah sebuah pelanggaran hukum.

3. Solusi yang tepat terhadap pelanggaran mengangkut penumpang lebih dari satu orang ini, ialah adanya peran aktif yang saling berkesinambungan agar tidak adanya perkataan tidak tahu tentang mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua adalah suatu hal yang dilarang oleh peraturan, dan kebijakan hukum pidana tentang sanksi ini lebih ditegaskan, serta penegakan hukumnya perlu di perhatikan dan di ganti apabila tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, disini dapat dijelaskan secara tegas bahwa mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua adalah hal yang membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain.

B. Saran

1. Seharusnya disediakan tempat posko bagi aparat penegak hukum untuk bertugas di banyak titik, dan setiap minggu dilakukannya penyuluhan ke warga-warga disetiap kelurahan agar masyarakat tau tentang pelanggaran lalu lintas mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua.

- seharusnya aparat penegak hukum melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke warga-warga khususnya anak-anak sekolah tentang pentingnya mentaati peraturan lalu lintas terutama mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua. serta mengetahui apa dampak dan sanksi yang ditimbulkan dari pelanggaran mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan.
2. Seharusnya adanya peran aktif masyarakat untuk melakukan dan mencari tau bahaya dari pelanggaran mengangkut penumpang lebih dari dua orang dalam kendaraan roda dua. dan masyarakat juga mulai menerapkan keselamatan dalam berkendara di jalan demi keselamatan pengguna jalan tersebut dan demi keselamatan orang lain.
 3. Undang-undangnya lebih tegas, aparatnya lebih peka ke aturan yang telah dibuat, dan pihak yang berwenang lebih mempertegas bagi masyarakat yang melanggar, agar masyarakat terbiasa kembali dalam berkendara yang aman dan tidak melakukan pelanggaran mengangkut penumpang lebih dari satu orang dalam kendaraan roda dua khususnya di Kota Payakumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief, Barda, Nawawi, 2018, *Masalah Penegakan Hukum Dan kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta
- Arif, Barda, Nawawi, 2007, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, Jakarta
- S, Laurensius, Arliman, 2016, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Deepblish, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 2012, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Achmat Irwan Hamzani, 2014, *"Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya"* Jurnal Yustisia, Edisi 9
- Dean Prakasa Hanif, 2019, *"Tinjauan Yuridis Terhadap Kewajiban Penyidik Dalam*

Mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Ke Kejaksaan Negri Pakanbaru”, Skripsi, Program Gelar Sarjana Hukum (S1) Universitas Riau

Jill Frank, “Theoretical Inquiries in Law”, *Critical Modernities: Politics and Law beyond the Liberal Imagination*, Thomson Reuters, *jurnal Westlaw*, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 9 Agustus 2020.

Ogy Ramajuary At Harahap ,2017, “*Peranan Kepolisian Lalu Lintas Dalam Peningkatan Disiplin Berlalu Lintas Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dumai*” JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume IV Nomor 1

Soetandyo Wingjosoebroto, 2002, “*Hukum dan Moral Pemerintahan yang Baik*”, *Jurnal Analisis Hukum*

<https://typoonline.com/kbbi/pelangan>

<https://typoonline.com/kbbi/penumpang>

<https://www.asikbelajar.com/pengertian-populasi-sampel-menurut-sugiyono/>

www.pasbana.com/2018/02/pamit-tiga-kakak-beradik-tewas.html

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 10 ayat (2) Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Internet

<https://typoonline.com/kbbi/mengangkut>